

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN
DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



OLEH:

MOH. WAHANA SURYA PRAYOGA
NPM. 0771010120

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN
DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN

Disusun oleh :

MOH. WAHANA SURYA PRAYOGA
NPM. 0771010120

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 15 Juni 2012

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. H. Sutrisno, SH. M.Hum. : (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001
2. Subani S.H M.Si. : (.....)
NIP. 195105041983031001
3. Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM. : (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro.S.H.,MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN
DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN

Disusun Oleh:

MOH.WAHANA SURYA PRAYOGA
NPM. 0771010120

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Subani S.H MS.i
NIP. 195105041983031001

Wiwini Yulianingsih,SH., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM
NIP. 196206251991031001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI
KABUPATEN PAMEKASAN

Oleh:

MOH. WAHANA SURYA PRAYOGA
NPM. 0771010120

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada tanggal 15 Juni 2012

Pembimbing Utama:

Tim Penguji :

1.

Subani S.H M.Si
NIP. 195105041983031001

Sutrisno S.H M.Hum
NIP. 19601212198031001

2.

Pembimbing Pendamping

Subani S.H M.Si
NIP. 195105041983031001

3.

Wiwin Yulianingsih,SH., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM
NIP. 195105041983031001

Mengetahui :

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM
NIP.196206251991031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Wahana Surya Prayoga
Tempat/ tanggal lahir : Pamekasan / 14 juli 1988
Npm : 0771010120
Kosentrasi : Pidana
Alamat : Jl Purba No 68 Pamekasan Madura

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN” Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar asli karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini yang saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing utama

Surabaya, juni 2012
Penulis

Subani S.H M.Si
Nip:195105041983031001

Moh. Wahana Surya Prayoga
Npm:0771010120

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahNya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berkaitan Dengan Carok Di Kabupaten Pamekasan”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih pada:

1. Bapak Haryo Sulistyantoro, S.H.,M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. EC Gendut Sukarno MS selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ketua Program Studi. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Bapak Subani, S.H., M.Si, selaku dosen pembimbing utama yang selalu banyak memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing pendamping skripsi yang selalu banyak memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum UPN Jatim
8. Kedua orang tuaku tercinta, kakakku tersayang dan seluruh saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.
9. Qoriah Nur Ambarwati yang selalu memberikan spirit, kasih sayang serta do’a dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman – temanku Fakultas Hukum UPN Jatim yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan penulis harapkan, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Hukum di Indonesia.

Surabaya, Juni 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Moh. Wahana Surya Prayoga
Npm : 0771010120
Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 14 juli 1988
Program Study : Pidana
Judul Skripsi :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN
DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN

ABSTRAKSI

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan carok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sumber data diperoleh dari literatur, Undang-undang dan wawancara terhadap hakim dan kades tempat terjadinya perkara. Analisa data yang digunakan menggunakan data deskriptif analisis yaitu mengkaji fakta social yang timbul di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah bagaimana Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan carok. Yang dimana Hakim mempertimbangan suatu putusan dalam menjatuhkan suatu pidana telah memperhatikan ketentuan didalam undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, dimana hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korban agar nilai-nilai hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana carok hakim melihat pada KUHP yang dimana pasal yang dikenakan bagi pelaku carok yaitu pasal 338 dan pasal 340 KUHP dan ada juga yang dikenakan pasal 355 ayat (1), pasal 55 ayat (1) ke-1.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pembunuhan, Carok

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Moh. Wahana Surya Prayoga
Npm : 0771010120
Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 14 juli 1988
Program Study : Pidana
Judul Skripsi :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN
DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN

ABSTRACT

This study aims to determine how the judge has passed a decision on criminal acts related to carok murder. This study uses sociological research methods juridical, the data obtained from literature sources, laws and interviews with judges and village heads the scene of the crime. Data analysis used the data using descriptive analysis examines the social facts that arise in society. The results of this study is how judges in decisions on criminal homicide carok. Judges take into consideration that where a judgment in a criminal has dropped the provision in the law No.48 of 2009 on judicial power, judges must explore, follow and understand the legal values of life and sense of justice in society, where the judge before dropping a decisions must consider the sense of justice for the accused and the victim to legal values can be run in accordance with its purpose. As for the criminal carok judges look at the Penal Code where the article is subjected to the perpetrator carok namely Article 338 and Article 340 of the Criminal Code and some are subject to Article 355 paragraph (1), Article 55 paragraph (1) to-1.

Key words: Consideration of Justice, Criminal Homicide, Carok

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Bimbingan Skripsi
2. Surat keterangan Penelitian
3. Surat Keterangan Wawancara
4. Hasil Wawancara
5. Putusan Pengadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kajian Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian	33
1.7 Metode Analisis Data.....	33
1.8 Sistematika Penulisan	33
1.9 Lokasi Penelitian	34

BAB II	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN CAROK	
2.1	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	
	Terhadap Pelaku Carok	36
2.1.1	Pendekatan Teori Probabilitas	36
2.1.2	Pendekatan Aljabar	37
2.1.3	Pendekatan Model Cerita	48
BAB II	IMPLEMENTASI PENJATUHAN HUKUMAN ATAS KASUS CAROK DI PENGADILAN PAMEKASAN	
3.1	Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Carok	44
3.2	Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Carok	59
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Kesimpulan.....	56
4.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut, diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan, bersifat berkesinambungan dan merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terarah.

Menurut Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa pidana meliputi suatu perbuatan atau hal melalaikan maupun akibatnya. Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa hukum yaitu kemasyarakatan yang menyebabkan timbulnya hukum.¹

Dari uraian tersebut tindak pidana merupakan bentuk perbuatan yang dapat merugikan masyarakat serta menimbulkan kecemasan di masyarakat. Untuk itu tindak pidana harus dicegah dan harus mendapatkan penanganan secara intensif dari para penegak hukum, baik bersifat persuasif, preventif, maupun repressif.

¹ Pipin Syarifin, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Bandung 1986 hal 251

Dari beberapa bentuk tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Pamekasan adalah tindak pidana pembunuhan yang secara umum lebih dikenal dengan istilah carok, dimana akibat yang ditimbulkan ialah hilangnya nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan carok sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang muncul akibat adanya ketegangan atau konflik yang terjadi dalam struktur sosial, seperti cemburu, mengganggu istri orang, persaingan bisnis, dendam, dan perebutan harta warisan. Beberapa motif awal tersebut merupakan motif yang sangat kuat, yang selalu memicu terjadinya carok bagi masyarakat Madura.

Adapun kasus carok yang disebabkan oleh rasa cemburu, seperti cemburu istri dipangku pria lain, clurit samsul bicara, Ardi Yanuar, Detik Surabaya, Pamekasan, Jum'at, 20/03/2009:

Pamekasan - Cinta tanpa ada cemburu serasa hambar. Namun cemburu juga bisa membawa petaka. Salah satu kasus cemburu yang bisa menewaskan seseorang terjadi di Pamekasan. Gara-gara dibakar cemburu, dua pria yang bertetangga warga Desa Blumbungan, Pamekasan, Madura terlibat carok. Peristiwa itu bermula saat Samsul (33) melihat istrinya, Sumaidah (27) dipangku pria asing bernama Samsul (28) Kamis malam (19/3/2009). Saat istrinya masuk rumah, pelaku menanyakan siapa yang memangkunya. Sumaidah pun mengaku jika pria yang memangku dirinya adalah Samsul, yang tak lain korbannya. Sumaidah pun lantas mengadu, jika korban memaksanya berbuat selingkuh. Mendengar laporan istrinya, pelaku menyiapkan celurit dan siap menghabisi korban. Pagi harinya, pelaku mencari korban yang tidur di teras mushola miliknya.

Sebelum membunuh, pelaku sempat membangunkan korban. Setelah korban terbangun, pelaku langsung mencabut celurit dan membacok korban secara membabi buta. Korban yang tak sempat melawan langsung ambruk bersimbah darah.

“Warga lalu membawa korban ke rumah sakit Pamekasan. Tapi dalam perjalanan menuju rumah sakit, korban meregang nyawa,” jelas Kapolsek Larangan, AKP Puryanto saat dihubungi di kantornya di Jalan

Raya Larangan. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit meski nyawanya tak tertolong lantaran luka di sekujur tubuhnya. Sementara setelah membunuh, pelaku langsung kabur ke Mapolsek Larangan.

Pelaku juga menyerahkan diri sambil membawa celurit barang bukti penuh darah. Kepada polisi, pelaku mengaku tega membunuh korban yang terbilang masih tetangganya sendiri lantaran cemburu. Pelaku pun dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup dan jerat subsidi pasal 353 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. (fat/fat).²

Terjadinya carok dengan latar belakang atau motif sebagaimana kasus tersebut di atas pada hakikatnya terkait dengan masalah harga diri seseorang atau kelompok orang. Masalah harga diri ini kemudian menimbulkan suatu perasaan yang dalam bahasa Madura disebut “malo” (malu) ketika terjadi pelecehan. Jadi kasus-kasus carok yang terjadi pada orang Madura selalu bersumber pada perasaan malo atau terhina pada diri si pelaku karena harga dirinya dilecehkan oleh orang lain. Bagi orang Madura, tindakan tidak menghargai dan tidak mengakui atau mengingkari peran dan status sosial sama artinya dengan memperlakukan dirinya sebagai orang yang “tada’ ajina” (tidak berani) dan pada gilirannya menimbulkan perasaan malo (malu). Dari perasaan malu ini selanjutnya berakibat pada perseteruan dan berakhir pada carok di antara kedua belah pihak dengan terbunuhnya salah satu pihak yang berseteru tersebut.

Menurut norma yang berlaku pada masyarakat Madura, jika ada istri diganggu oleh orang lain, maka bagi si pengganggu tersebut harus dibunuh dan tidak boleh dibiarkan. Hal itu disebabkan bahwa tindakan mengganggu istri tersebut termasuk perbuatan aib yang melecehkan harga diri dan martabat

²Ardi Yanuar, Cemburu Istri Dipangku Pria Lain, Clurit Samsul Bicara, <http://surabaya.detik.com>, Di akses pada tanggal 27 Februari 2012, 08.00 WIB

orang Madura. Carok (baik yang disebabkan oleh gangguan pada istri, cemburu, perebutan harta warisan, tersinggung, dan sebagainya) termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat menimbulkan penderitaan dan bahkan menghilangkan nyawa seseorang, maka untuk kasus carok yang terjadi selama ini di Pamekasan para pelakunya diancam dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan 340 KUHP. Berikut dikemukakan kutipan Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP.

Pasal 338

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 340

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal tersebut bagi pelaku carok tidak lain karena carok telah memenuhi rumusan yang ada dalam Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP, di mana rumusan tersebut terdapat adanya suatu tindak pidana yang merugikan orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang. Namun pada realitanya yang terjadi pada saat ini, carok dapat dikategorikan sebagai kasus direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP), karena selain menghilangkan nyawa orang lain juga mengandung unsur direncanakan terlebih dahulu, di mana dalam melakukan

carok tersebut biasanya dimatangkan atau dipersiapkan terlebih dahulu dalam suatu sidang keluarga.

Berdasarkan pasal 338 dan 340 KUHP tersebut nampak jelas bahwa tindak pidana pembunuhan dengan carok termasuk kejahatan, dan bagi pelakunya (si pembunuh) dikenakan hukuman sesuai pelanggaran yang telah diperbuatnya. Namun hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan carok di Pengadilan Negeri Pamekasan bertentangan dan tidak sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap penjatuhan pidananya kepada pelaku tindak pidana pembunuhan carok, dimana hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan carok masih cenderung ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan permasalahan di atas mendorong penulis untuk mengkaji masalah tersebut melalui penelitian dengan judul: “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana yang Lebih Ringan dari Tuntutan Penuntut Umum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Berkaitan dengan Kasus Carok (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan pada latar belakang di atas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum terhadap pelaku pembunuhan carok?

2. Bagaimana implementasi penjatuhan hukuman atas kasus carok di Pengadilan Negeri Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum terhadap pelaku pembunuhan carok
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi penjatuhan hukuman atas kasus carok di Pengadilan Negeri Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Menambah wawasan tentang asas kepastian hukum dalam pelaksanaannya oleh para penegak hukum.
 - b. Menambah wawasan tentang penerapan KUHP, terutama berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dengan carok yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.
 - c. Menjadi dasar dan referensi untuk penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis
 - a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas sanksi hukum yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan dengan carok sesuai KUHP.

b. Bagi Fakultas Hukum

Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

c. Bagi Pengadilan Negeri Pamekasan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak pengadilan khususnya hakim sebagai kunci utama terwujudnya keadilan untuk dapat mengambil langkah – langkah dan kebijakan yang efektif dalam menangani berbagai permasalahan yang ditimbulkan karena carok.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dengan carok sehingga memberikan kesadaran mendalam dan tidak melanggarnya.

1.5 Kajian Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum dan dapat dilakukan dengan berbagai cara.³ Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau

³ <http://id.wikipedia.org>, Di akses pada tanggal 27 Februari 2012

tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tercela, ataupun tidak patut.

Pengertian Pembunuhan menurut kamus hukum adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lain.⁴

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam pasal 338 KUHP, yang mengatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya.

⁴ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung. 2008, hal.312.

2. Jenis-jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa.

Pembunuhan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya :

a. Pembunuhan Biasa

Hal ini diatur oleh pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur-unsur pembunuhan adalah:

- Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukannya.
- Dengan sengaja: dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (dolus) yakni:
 - sengaja sebagai maksud.
 - sengaja dengan keinsyafan pasti.
 - sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/dolus eventualis.
 - menghilangkan nyawa orang lain.⁵

Sebagian pakar menggunakan istilah “merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan.⁶

b. Pembunuhan berencana

Hal ini diatur oleh pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

⁵ Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 22

⁶ Ibid

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.V.T. pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan antara lain:

“Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.⁷

Dari kedua pasal tersebut, yaitu pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan, adalah perbuatan sengaja yang dilakukan orang terhadap orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa tersebut.

B. Kajian umum tentang Carok

1. Pengertian Carok

Carok merupakan bagian dari tindak kekerasan. Carok berasal dari bahasa Madura yang diistilahkan sebagai suatu bentuk perkelahian antara dua orang atau lebih dengan menggunakan senjata tajam atau benda tumpul yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Bila tidak menggunakan senjata tajam atau tidak menggunakan senjata sama sekali, hal itu diistilahkan dengan “tokar”. Carok ada dilakukan secara individual, yakni satu lawan satu, dan ada pula yang dilakukan secara massal, yakni dilakukan antara dua orang atau lebih.

⁷ Ibid, hal 31

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka carok timbul disebabkan oleh adanya pelecehan dari seseorang kepada orang lain, atau karena seseorang itu disakiti sehingga menyebabkan harga dirinya merasa direndahkan. Akibat adanya pelecehan terhadap diri seseorang itu, maka hal yang demikian itu seringkali menimbulkan carok bagi orang yang melecehkan tersebut. Akibat terjadinya carok ini, maka memberikan dampak derita yang berkepanjangan, baik bagi si pembunuh maupun si terbunuh, yakni berupa hilangnya jiwa, harta benda, dan kehormatan.

2. Carok Sebagai Bagian Budaya Orang Madura

Pulau Madura atau lebih dikenal dengan pulau garam Letaknya yang berada di sebelah utara Pulau Jawa, mempunyai masyarakat dengan budayanya yang khas, dalam arti, mempunyai corak, karakter dan sifat yang berbeda dengan masyarakat Jawa. Masyarakatnya yang santun, membuat masyarakat Madura disegani, dihormati bahkan “ditakuti” oleh masyarakat yang lain.

Kebaikan yang diperoleh oleh masyarakat atau orang Madura akan dibalas dengan serupa atau lebih baik. Namun, jika dia disakiti atau diinjak harga dirinya, tidak menutup kemungkinan dia akan membalas dengan yang lebih kejam. Ada sebuah adagium masyarakat Madura, yang sampai sekarang sudah mendarah daging, “ango’an poteya tolang etembang poteya mata”

Banyak orang yang mengatakan bahwa masyarakat Madura itu unik, estetis dan agamis. Bahkan, ada yang mengenal masyarakat “pulau garam” ini adalah masyarakat santri, nan sopan tutur katanya dan kepribadiannya.

Kita mungkin mengenal Carok sebagai budaya orang Madura. Carok merupakan budaya Madura masa silam yang menjunjung tinggi harga diri keluarga jika kehormatannya diganggu, maka carok adalah penyelesaian yang terhormat.⁸ Carok dan celurit laksana dua sisi mata uang. Hal ini muncul di kalangan orang-orang Madura sejak zaman penjajahan Belanda abad 18 M. Carok merupakan simbol kesatria dalam memperjuangkan harga diri (kehormatan).⁹

Pada zaman Cakraningrat, Joko Tole dan Panembahan Semolo di Madura, tidak mengenal budaya tersebut. Budaya yang ada waktu itu adalah membunuh orang secara kesatria dengan menggunakan pedang atau keris. Senjata celurit mulai muncul pada zaman legenda Pak Sakera. Bahkan pada masa pemerintahan Penembahan Semolo, putra dari Bindara Saud putra Sunan Kudus di abad ke-17 M tidak ada istilah carok. Munculnya budaya carok di pulau Madura bermula pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-18 M.

Setelah Pak Sakerah tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, Jawa Timur, orang-orang bawah mulai berani melakukan

⁸ <http://www.shalatcenterjabar.org>. diakses pada tanggal 28 Februari 2012

⁹ Junaidi, Adat-Istiadat-Madura, <http://1001-madura.com>. Di akses pada tanggal 28 Februari 2012

perlawanan pada penindas. Senjatanya adalah celurit. Karena provokasi Belanda itulah, golongan blater yang seringkali melakukan carok pada masa itu. Celurit digunakan Sakera sebagai simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda. Sedangkan bagi Belanda, celurit disimbolkan sebagai senjata para jagoan dan penjahat. Upaya Belanda tersebut rupanya berhasil merasuki sebagian masyarakat Madura dan menjadi filsafat hidupnya. Bahwa kalau ada persoalan, perselingkuhan, perebutan tanah, dan sebagainya selalu menggunakan kebijakan dengan jalan carok. Senjata yang digunakan selalu celurit.

Padahal sebenarnya tidak semua masyarakat Madura demikian. Masyarakat Madura yang memiliki sikap halus, tahu sopan santun, berkata lembut, tidak suka bercerai, tidak suka bertengkar, tanpa menggunakan senjata celurit, dan sebagainya adalah dari kalangan masyarakat santri. Mereka ini keturunan orang-orang yang zaman dahulu bertujuan melawan penjajah Belanda. Setelah sekian tahun penjajah Belanda meninggalkan pulau Madura, budaya carok dan menggunakan celurit untuk menghabisi lawannya masih tetap ada, baik itu di Bangkalan, Sampang, maupun Pamekasan.¹⁰

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Carok

Carok yang merupakan bagian dari tindak kekerasan yang telah membudaya pada masyarakat Madura, ternyata tidak hanya dilakukan kaum laki-laki saja, melainkan juga dilakukan oleh kaum wanita dan kaum

¹⁰Ibid.

remaja. Pada umumnya kasus carok ini muncul sebagai akibat dari pelecehan harga diri. Bagi orang Madura bila harga dirinya dilecehkan, maka hal itu dianggap sama halnya dengan pelecehan terhadap kapasitas dirinya. Tindakan tidak menghargai dan tidak mengakui peran dan status sosial masyarakat tersebut, pada akhirnya akan menimbulkan perasaan malu. Jika orang Madura dipermalukan, dia akan menghunus cluritnya dan seketika itu pula akan menuntut balas atau menunggu kesempatan lain untuk melakukannya. Bahkan ungkapan yang lebih tegas lagi adalah “*tambana todus, mate*” (obatnya malu adalah mati). Makna dari ungkapan tersebut adalah bahwa tindakan pembunuhan perlu dilakukan untuk membela atau mempertahankan harga diri dan kehormatan. Oleh karena itu, tindakan tersebut selain dibenarkan secara kultural, juga mendapatkan persetujuan sosial.

Perasaan malu sebagai akibat dari perlakuan orang lain yang mengingkari atau tidak mengakui kapasitas dirinya, maka akan menimbulkan perlawanan sebagai upaya untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan tersebut. Tindakan perlawanan tersebut cenderung sangat keras (dalam bentuk ekstrimnya adalah pembunuhan). Suatu ungkapan yang berbunyi: “*ango'an poteya tolang etembang poteya mata*” (lebih baik mati daripada harus menanggung perasaan malu), memberi suatu indikasi yang sangat kuat tentang kasus carok. Perasaan malu karena dilecehkan harga dirinya oleh orang lain, dapat teresklasikan ke dalam lingkup yang lebih luas, yakni keluarga dan masyarakat. Hal ini bisa

terjadi apabila pelecehan harga diri tersebut telah menyangkut pada harga diri keluarga dan masyarakat.

Secara garis besarnya, faktor-faktor penyebab terjadinya carok bagi orang Madura dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kasus-kasus carok yang bermotifkan gangguan terhadap istri dan kasus-kasus carok yang bermotifkan selain gangguan terhadap istri.

Tindakan mengganggu istri orang atau perselingkuhan, merupakan bentuk pelecehan harga diri paling menyakitkan bagi laki-laki Madura. Oleh karena itu, tiada cara lain untuk menebusnya kecuali membunuh orang yang mengganggu itu. Orang Madura memandang institusi perkawinan tidak hanya berfungsi sebagaimana dikenal oleh masyarakat dalam kebudayaan lain, tetapi juga berfungsi sebagai manifestasi kelakian-lakian. Artinya, seorang laki-laki Madura baru akan menemukan dirinya sebagai seorang laki-laki apabila telah kawin dengan seorang perempuan. Itu sebabnya, terlepas dari pandangan agama Islam yang membolehkan seorang laki-laki mengawini empat orang perempuan dengan syarat-syarat yang sangat ketat, tidak sedikit laki-laki Madura merasa tidak cukup hanya mempunyai istri lebih dari seorang untuk semakin menegaskan kewibawaannya. Bahkan bagi seorang laki-laki yang telah dikenal sebagai seorang jago, poligami merupakan tuntutan untuk semakin mempertegas predikat kejagoannya. Dalam konteks ini, mudah dipahami bahwa apabila tindakan mengganggu istri orang dianggap sebagai pelecehan harga diri laki-laki (suami) yang sangat menyakitkan dan menimbulkan perasaan

malu yang tidak terobati, kecuali membunuh orang yang melakukan tindakan itu. Perasaan malu akibat terjadinya gangguan terhadap istri tidak hanya dirasakan oleh pihak suami saja, tetapi juga oleh kerabat dan lingkungan sosialnya.

Berdasarkan pernyataan yang memang berlaku bagi orang Madura, bila terjadi permasalahan berupa gangguan terhadap istri, maka ada dua alternatif yang akan dilakukan oleh seorang suami. Pertama, alternatif ini sudah merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditawar lagi, yakni membunuh laki-laki yang telah mengganggu tersebut. Kedua, membunuh kedua-duanya yakni laki-laki yang dianggap telah mengganggu sekaligus dengan istrinya.

Alternatif pertama biasanya diambil jika suami menyadari bahwa tindakan laki-laki pengganggu istrinya hanya merupakan tindakan sepihak. Namun jika antara laki-laki itu dan istrinya sudah diyakini menjalin hubungan cinta, maka alternatif kedua yang akan dipilihnya. Lebih-lebih jika suami mengetahui atau menyaksikan sendiri secara langsung adanya perselingkuhan antara keduanya.

Berdasarkan kenyataan, bahwa bukan hanya gangguan terhadap kehormatan istri yang dapat mengusik harga diri orang Madura sehingga menimbulkan carok, tetapi setiap bentuk tindakan yang dapat menimbulkan perasaan malu selalu berakhir dengan carok. Di antara penyebab terjadinya carok bagi orang Madura di samping adanya gangguan terhadap istri, juga dipicu oleh persoalan sebagai berikut:

1) Persaingan bisnis

Persaingan bisnis juga merupakan salah satu penyebab terjadinya carok bagi orang Madura. Bila bisnisnya merasa disaingi oleh orang lain terutama persaingan tidak sehat, maka seseorang yang merasa disaingi tersebut menaruh rasa dendam kepada orang yang menyainginya.

2) Mempertahankan martabat

Martabat atau harga diri seseorang harus dihormati dan dijunjung tinggi agar tidak menimbulkan konflik. Bila harga diri seseorang dilecehkan, maka hal ini dapat menimbulkan konflik dengan orang yang dianggap melecehkan. Pada diri seseorang yang martabat atau harga dirinya dilecehkan itu terdapat perasaan malu. Perasaan malu ini kemudian memunculkan perasaan benci yang sangat kuat, sehingga seseorang itu tidak menerima atas perlakuan orang lain yang bersifat sewenang-wenang.

Martabat atau harga diri sangat mahal bagi orang Madura, karena bila martabatnya dilecehkan oleh orang lain, maka alternatif yang ditempuh adalah tindak kekerasan berupa carok yang bisa menghilangkan nyawa seseorang.

3) Perebutan harta warisan

Faktor penyebab terjadinya carok yang terjadi pada kalangan masyarakat Madura juga dipicu oleh perebutan warisan antara saudara kandung dengan saudara kandung, antara keponakan dengan

paman/bibi dan sebaliknya, dan antara saudara misan dengan saudara misan. Harta warisan yang merupakan peninggalan orang tua sangat rawan dan sering memicu terjadinya carok, bila pembagiannya tidak beres. Di antara sesama saudara, keponakan dengan paman/bibi, dan saudara misan dengan saudara misan saling menuntut bahwa harta warisan itu adalah haknya. Di antara mereka tidak ada yang mau mengalah dan sama-sama mengotot bahwa yang berhak terhadap harta warisan adalah dirinya dengan berbagai alasan yang dilontarkan.

Adanya saling menuntut terhadap harta warisan, pada akhirnya menimbulkan suatu permusuhan yang berkepanjangan di antara sesama keluarga dan saudara. Puncak dari permusuhan ini pada akhirnya berakhir dengan carok antara sesama keluarga atau antara sesama saudara sendiri.

4) Pembalasan dendam

Dendam merupakan suatu keinginan keras seseorang untuk membalas atas kejahatan yang telah diperbuat oleh orang lain. Perasaan dendam ini bersemi dalam hati seseorang yang mengendap begitu lama sebelum keinginannya tercapai. Perasaan dendam ini baru berakhir pada diri seseorang apabila keinginan untuk membalas kejahatan yang telah diperbuat oleh orang lain terlaksana dan tercapai dengan baik.

Perasaan dendam ini muncul pada diri seseorang sebagai akibat dari adanya perlakuan tidak senonoh atau tindak kejahatan yang

diperbuat oleh orang lain terhadap diri atau keluarganya yang dianggap mencoreng nama baik. Tercorengnya nama baik diri atau keluarganya sebagai akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain sama halnya dengan pelecehan terhadap harga diri seseorang atau keluarganya. Akibat adanya pelecehan ini, maka yang ada pada diri seseorang itu hanya perasaan malu yang sangat kuat, dan kemudian timbul perasaan dendam yang membara pada diri seseorang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya carok di Madura secara garis besarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni kasus carok yang bermotifkan gangguan terhadap istri dan kasus carok yang bermotifkan selain gangguan terhadap istri. Gangguan yang bermotifkan selain istri di antaranya mencakup persaingan bisnis, mempertahankan martabat, perebutan harta warisan, dan pembalasan dendam.

Kasus carok, baik yang bermotifkan gangguan terhadap istri maupun yang bermotifkan selain gangguan terhadap istri, pada hakikatnya dipandang memiliki kedudukan yang sama oleh orang Madura. Artinya, kasus-kasus tersebut sama-sama mendatangkan aib yang sangat memalukan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap anggota keluarga yang lain. Dengan demikian, alternatif yang ditempuh untuk menghilangkan rasa malu tersebut adalah tindak

kekerasan dalam bentuk carok, baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif.

4. Carok Ditinjau dari Sudut KUHP

Carok yang menjadi bagian budaya orang Madura termasuk dalam kategori tindakan anarkhis, yang mendatangkan penderitaan atau hilangnya nyawa seseorang. Penderitaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh si pelaku, tetapi juga oleh seluruh anggota keluarga lainnya. Permusuhan dan dendam yang membara bagi anggota keluarga kedua belah tidak akan mudah hilang, dan sewaktu-waktu dapat menyulut munculnya kasus carok baru sebagai reaksi pembalasan dendam.

Bagi si pelaku carok, baik menang maupun kalah sama-sama mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Harta dan nyawa melayang secara percuma. Carok menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak, baik yang membunuh maupun yang terbunuh. Kerugian yang dimaksud dalam konteks ini adalah hilangnya nyawa seseorang dan harta benda, yang pada akhirnya kasus ini juga dapat memicu timbulnya kasus baru dari peristiwa carok tersebut bagi anggota keluarga dari kedua belah pihak.

Carok termasuk dalam kategori tindak kejahatan yang dapat menimbulkan penderitaan dan bahkan menghilangkan nyawa seseorang, maka carok dipandang dari sudut KUHP dilarang sebagaimana penjelasan pasal 338 dan 340 KUHP:

- 1) Kutipan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan terhadap Nyawa orang.

Pasal 338

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 340

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” .

- 2) Kutipan Kitab Undang-undang Pidana tentang Penganiayaan

Pasal 351

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus ribu rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Pasal 353

- (1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 354

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Pasal 355

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, maka perbuatan carok merupakan tindak kejahatan, karena di dalamnya ada unsur pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Sanksi bagi pelaku carok dapat dikenakan hukuman sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

1. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹ yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.

Hakim berbeda dengan Pejabat pejabat yang lain, hakim harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Hal ini tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro¹², bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, op, cit., hal.8

¹² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 102

secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara.

Beberapa tugas hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman antara lain:

- a. Tugas pokok dalam bidang dalam bidang peradilan
 - Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat 1)
 - Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2)
 - Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat 1)
- b. Tugas Yuridis, yaitu memberi keterangan dan pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (pasal 22 ayat 1)
- c. Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat 1).
Hakim selaku pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman

memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) serta pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:¹³

Pasal 5 ayat (1)

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 8 ayat (2)

- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, loc.cit.

Pasal 17

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
 - (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
 - (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
 - (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
 - (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
 - (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.
- Berdasarkan pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) dan pasal 17 ayat (1)

sampai dengan ayat (7) tersebut di atas nampak jelas bahwa meskipun hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, maka dalam menjalankan tugasnya tetap mengacu kepada ketentuan pasal – pasal tersebut. Ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) serta pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (7) tersebut merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana hukum.

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Jenis-jenis putusan hakim dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Putusan bebas (*vrijspraak*), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
- c. Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum yaitu apabila surat dakwaan tdk memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau PH dlm eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.
- e. Putusan yang menyatakan dakwaan tdk dapat diterima yaitu apabila surat dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru.¹⁴

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Dalam upaya membuat putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak. Tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan kasus carok termasuk dalam kategori tindak kejahatan dan penganiayaan yang menghilangkan nyawa orang. Dalam menjatuhkan pidana bagi si pembunuh, baik dilakukan secara sengaja dan berencana, tentu harus mengacu kepada ketentuan pasal 338 atau 340 KUHP. Bunyi selengkapnya pasal 338 dan 340 tersebut adalah:

¹⁴ Santos, Putusan dan Jenis-jenis putusan, <http://www.santoslolowang.com> . Di akses pada tanggal 28 Februari 2012

Pasal 338

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 340

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” .

Berdasarkan ketentuan pasal 338 dan 340 tersebut dapat dijadikan petunjuk yang jelas bahwa pembunuhan yang terkait dengan kasus carok yang terjadi di Madura pada umumnya merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan bahkan telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, maka bagi si pembunuh harus dikenakan pasal 338 dengan pidana paling lama lima belas tahun, atau pasal 340 dengan pidana paling lama dua puluh tahun. Namun, bagaimana cara hakim menjatuhkan pidana ringan atau berat terhadap pelaku pembunuhan yang berkaitan dengan kasus carok yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 338 atau pasal 340 tersebut? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dikaji ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

.

Pasal 8 ayat (2)

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana ringan atau berat terhadap pelaku pembunuhan yang berkaitan dengan carok. Artinya, meskipun tindak pembunuhan dalam kasus carok termasuk tindak kejahatan karena menghilangkan nyawa orang, maka seorang hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai atau norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat dan sifat baik pelaku. Misalnya, norma yang berlaku di Madura adalah bahwa bagi pengganggu istri orang harus dibunuh, karena perbuatan tersebut melecehkan harga diri dan seluruh keluarga. Pada sebagian besar masyarakat Madura, nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat tersebut dijunjung tinggi dan berlaku sampai saat ini dengan tujuan untuk mempertahankan hak-haknya dari gangguan orang lain, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ringan pada terdakwa. Demikian juga dalam persidangan, jika pelaku pembunuhan selalu menunjukkan sifat kooperatif, sopan, dan berkata jujur, semua itu menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan yang pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntutan umum.

D. Tinjauan tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan suatu sanksi atau penderitaan yang dilakukan oleh hakim kepada pelaku tindak kejahatan. Penderitaan yang dilakukan secara sengaja oleh negara kepada orang-orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan yang dilarang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada hakikatnya dimaksudkan agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila orang tersebut terlanjur melakukan perbuatan yang dilarang, maka melalui pidana ini diharapkan tidak mengulangi kembali terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut.

Jadi setiap perbuatan tindak pidana yang didalamnya termasuk pembunuhan dengan carok harus diberikan suatu pidana atau penderitaan yang berupa hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini.

2. Teori-teori Tujuan Pemidanaan

Adapun yang termasuk teori-teori pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Mutlak

Menurut teori absolute ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat

pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkan pidana.¹⁵

b. Teori Relatif atau Nisbi

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri.

c. Teori-teori Gabungan (Verenigings-Theorien)

Apabila terdapat dua pendapat yang diamertal berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Demikian juga disamping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (vergelding) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.¹⁶

Dari uraian di atas adanya teori-teori hukum pidana yang bersifat absolut dan yang bersifat relatif sebagai dua aliran yang merupakan anatesis, maka ada teori gabungan yang berada di tengah-tengah. Dalam praktek pembedaan di Indonesia apabila menggunakan teori-teori absolut dan teori relatif, sekiranya jarang sekali atau barang kali praktis tidak ada terjadi suatu pidana tertentu dalam perkara tertentu yang tidak memenuhi

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 23.

¹⁶ Ibid, hal.27

syarat prevensi atau memperbaiki penjahat yang menjadi tujuan teori-teori relatif.¹⁷ Akan tetapi dalam praktek pemidanaan, teori-teori absolut sering dipergunakan untuk mencapai tujuan dari pemidanaan dimana suatu “pembalasan”(vergelding) oleh banyak orang yang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan

3. Tujuan Pemidanaan di Indonesia

Pada hakikatnya tujuan pidana yang dilakukan oleh negara kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang bukan untuk membelenggu kebebasan mereka. Namun pidana tersebut dilakukan untuk mewujudkan sikap saling menghormati di antara orang-orang dalam suatu wilayah negara, sehingga tidak terjadi perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Menurut para ahli hukum dinyatakan bahwa tujuan hukum pidana sebagai berikut:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventie) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁸

Berdasarkan tujuan pidana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana sangat berperan besar dan sangat penting dalam meminimalkan segala bentuk kejahatan yang sering terjadi, sehingga

¹⁷ Ibid, hal.29

¹⁸Ibid, hal. 19.

dengan adanya suatu hukum pidana diharapkan dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tentram.

4. Pidana dalam KUHP

Hakim dalam menjatuhkan pidana berpegang pada Pasal 12 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang batas minimum umum pidana (straf minima) yakni satu hari dan maksimum umum pidana (straf maksima) yakni 15 tahun. Dalam batas minimum dan maksimum tersebut hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang dianggap paling tepat. Mekanisme lebih lanjut tentang pengenaan pidana (strafmaat) diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidananya, dan diserahkan kepada hakim untuk memutus berat ringannya pidana yang harus dijalankan oleh terpidana manakala terbukti sah dan meyakinkan serta dijatuhkan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum pasti (kracht van gewijsde).¹⁹

1.6 Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan agar dapat diungkap dan didapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap objek penelitian dan nara sumber.²⁰ Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini diharapkan mampu memahami dan mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari

¹⁹ Budiyanto, pidana dan ppidanaan, <http://budi339.wordpress.com>. Di akses pada tanggal 29 Februari 2012

²⁰ <http://www.unsoed.ac.id>. Di akses pada tanggal 29 Februari 2012

tuntutan penuntut umum terhadap perilaku tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan kasus carok.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama.²¹ Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.²²

Data primer bersumber dari hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh melalui putusan hakim yang berisi tentang terjadinya realita carok serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan wawancara dengan nara sumber yang dianggap menguasai bidangnya, yaitu mereka yang terkait langsung dengan permasalahan yang akan diteliti seperti Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan dan pelaku pembunuhan yang berkaitan dengan kasus carok.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan tertulis yang ada pada dokumentasi, pendapat pakar, dan undang-undang yang menunjang bahan hukum primer. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari data statistik di Pengadilan Negeri Pamekasan dan literatur-literatur yang secara teoritis berhubungan dengan obyek penelitian.

²¹ <http://www.scribd.com>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2012

²² Ibid

C. Metode Pengumpulan Data

1. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan dan Hakim.
2. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan, mempelajari dan memahami sumber informasi, baik berupa literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah maupun situs internet yang relevan dan yang berhubungan dengan pembahasan.

1.7 Metode Analisis Data

Untuk data primer, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menguraikan, menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis tentang realita pembunuhan dengan carok dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ringan terhadap pelaku tindak pembunuhan yang berkaitan dengan carok. Selanjutnya dilakukan pengkajian secara substansial sesuai dengan permasalahan yang ada berdasarkan teori, asas, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap isi skripsi secara keseluruhan, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam bab I adalah bab pendahuluan, disini diuraikan tentang latar belakang dan factor-faktor yang mendorong timbulnya permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi

penelitian. Sehingga melalui isi dari bab 1 akan tampak alasan penyusun memilih obyek penulisan tentang “ Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berkaitan Dengan Carok Di Kabupaten Pamekasan”.

Sedangkan dalam bab II merupakan jawaban dalam permasalahan yang pertama. Penyusun akan membahas tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum terhadap pelaku pembunuhan carok.

Kemudian dalam bab III penyusun akan membahas tentang permasalahan yang kedua yaitu bagaimana implementasi penjatuhan hukuman atas kasus carok di Pengadilan Negeri Pamekasan.

Terakhir bab IV merupakan bab penutup dimana penyusun akan menguraikan mengenai kesimpulan atas semua permasalahan-permasalahan yang telah dibahas dalam bab II dan bab III, selain itu penyusun akan memberikan saran yang bermanfaat bagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan carok.

1.9 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Pengadilan Negeri Pamekasan. Pengadilan Negeri Pamekasan merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang ada di Kabupaten Pamekasan, terletak di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau di Jl. Pangeran Trunojoyo

Kotak Pos 48 Pamekasan. Pengadilan Negeri Pamekasan berada di sebelah selatan ibu kota kabupaten berjarak sekitar 2 kilometer. Dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan pelaksanaan tugas, Pengadilan Negeri Pamekasan telah melaksanakan kebijakan secara umum sebagai berikut menyelenggarakan prosedur penerimaan perkara secara tertib dan cepat, menyelenggarakan persidangan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan bebas KKN dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.